
Pergolakan Agraria 1965-1966 di Banyuwangi

The Agrarian Agitation of 1965-1966 in Banyuwangi

Hanif Risa Mustafa

Tribun Lampung Journalist

hanifrisamustafa@gmail.com

Abstract

Writing agrarian history often places the forced cultivation system in the colonial period as the main focus, while the issues of agrarian problems during the transition from the old order to the new order are slightly touched on. In Banyuwangi, the implementation of UUPA became a dispute between PKI and NU sympathizers. Disputes escalated after the September 30 Movement. This paper questions again what factors triggered the agitation in Banyuwangi, and whether the violence between groups in Banyuwangi that occurred was related to the agrarian Agitation of 1965-1966. The aim is to review the roots of agrarian problems that occur in Banyuwangi society. This paper uses the historical method. PKI with the combined strength of BTI and Pemuda Rakyat in Banyuwangi took unilateral action. This unilateral action caused criticism from the injured parties. As a result of the unilateral action there was a reverse flow from the group that defended its land. In politics in Banyuwangi the backflow was shown by the inauguration of the district head's inauguration. The backflow increasingly developed damage to several facilities belonging to PKI sympathizers. The peak of tension was marked by the incidents of Cemetuk and Karangasem. The unilateral action in Banyuwangi was rooted in a group of PKI sympathizers who were anxious that they had not immediately obtained the promised land from the UUPA, while the reverse flow was a form of resistance to unilateral action. Polarized societies against groups clashed with problems of agrarian conflict have triggered conflict.

Abstrak

Penulisan sejarah agraria kerap menempatkan sistem tanam paksa masa kolonial sebagai fokus utama, sedangkan isu-isu permasalahan agraria masa peralihan orde lama ke orde baru sedikit disinggung. Di Banyuwangi, implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi perselisihan antar simpatisan PKI dan NU. Perselisihan makin meningkat setelah peristiwa Gerakan 30 September. Tulisan ini mempertanyakan kembali faktor apa yang menyulut pergolakan di Banyuwangi, dan apakah kekerasan antar kelompok di Banyuwangi yang terjadi berkaitan dengan pergolakan agraria tahun 1965-1966. Tujuannya untuk meninjau kembali akar permasalahan agraria yang berlangsung pada masyarakat Banyuwangi. Tulisan ini menggunakan metode sejarah namun mengingat penelitian ini bersifat kontemporer, maka sumber yang digunakan sumber tertulis serta tinjauan dari kajian yang sudah ada sebelumnya berupa literatur dan kajian akademis. PKI dengan kekuatan gabungan BTI (Barisan tani Indonesia) dan Pemuda Rakyat di Banyuwangi melakukan aksi sepihak. Aksi ini dianggap sebagai perjuangan hak

atas tanah. Aksi sepihak ini menimbulkan kecaman dari pihak-pihak yang dirugikan. Akibat adanya aksi sepihak tersebut terjadilah arus balik dari kelompok yang mempertahankan tanahnya. Pada perpolitikan di Banyuwangi arus balik ditunjukkan dengan kegagalan pelantikan bupati, lantaran calon dianggap melindungi aksi sepihak. Arus balik semakin berkembang pengerusakan beberapa fasilitas milik simpatisan PKI. Puncak ketegangan ditandai dengan insiden Cemetuk dan Karangasem. Aksi sepihak di Banyuwangi berakar pada kelompok simpatisan PKI yang resah belum segera mendapatkan tanah yang dijanjikan dari program UUPA, sementara arus balik bentuk perlawanan terhadap aksi sepihak. Masyarakat yang terpolarisasi atas golongan dibenturkan dengan permasalahan konflik agraria telah memicu konflik.

Kata kunci: agraria, aksi sepihak, arus balik, pergolakan 1965-1966

Pendahuluan

Menulis sejarah bukan hanya persoalan benar dan salah, namun yang menjadi sorotan penting adalah melihat permasalahan dalam peristiwa secara multikompleks. Seperti yang dikatakan oleh Alun Munslow (2003:3) bahwa sejarah dilihat sebagai peristiwa yang mampu menjelaskan persoalan yang multikompleks. Persoalan multikompleks tersebut tidak dapat didekati dengan pendekatan konvensional – sebuah pendekatan sejarah lama – dan hanya dapat dikaji dengan sebuah pendekatan yang multidimensioanal. Sehingga dalam melihat sejarah dapat menjadi luas melalui analitis kritis yang ditunjang konsep analisis sosial.

Selama ini yang terlihat dalam penulisan sejarah Indonesia mengalami tumpang tindih. Ini disebabkan adanya kepentingan-kepentingan kelompok yang berupaya menghapus permasalahan penting dengan beberapa tujuan. Hal tersebut menyebabkan adanya plus minus dalam historiografi Indonesia.

Seperti halnya penulisan permasalahan agraria, dalam pendidikan Indonesia hanya menempatkan sistem tanam paksa masa kolonial sebagai fokus utama, sedangkan isu-isu permasalahan agraria masa revolusi dan masa peralihan orde lama – orde baru hanya disinggung sedikit dengan sebuah peristiwa landreform. Jika ditelisik lebih mendalam permasalahan agraria tahun 1965-1966 sangatlah kompleks dan imbasnya berpengaruh sangat luas.

Menurut Kuntowijoyo (2008) guna sejarah secara ekstrinsik ialah terkait dengan proses penanaman nilai, proses pendidikan. Sejarah tidak hanya sebagai sesuatu untuk melegitaskan kekuasaan namun juga sebagai sumber informasi serta merepresentasikan masa lalu untuk masa depan. Apa guna sejarah apabila hanya membutakan generasi bangsa selanjutnya. Seperti yang ditegaskan pada UUD'45 pasal 31 ayat 3;

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”

Kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan sebuah representasi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam kemajuan bangsa. Namun pengaburan fakta sejarah untuk menutupi kegagalan dalam rezim apakah itu merupakan suatu bentuk pencerdasan.

Menyinggung kembali sedikit permasalahan yang ada dalam agraria pasca colonial banyak menyingkap tabir yang tabu. Banyak kekerasan yang terjadi dalam permasalahan ini, pergolakan perebutan tanah hanya untuk sebuah kekuasaan.

Permasalahan agraria pascakolonial pada historiografi Indonesia sangat menarik sekali untuk dibahas. Masyarakat Banyuwangi yang plural, sebelum konflik Gerakan 30 September berkejolak serta pengaruh partai politik didominasi oleh dua kekuatan yang menonjol, yaitu PKI dan NU (Arbit Sanit, 2000:175).

Persaingan antar kekuatan utama di Banyuwangi tersebut sudah sangat terlihat sejak periode pendudukan Belanda. PKI membunuh pemimpin-pemimpin NU sejak masa pendudukan Belanda. Pembunuhan ini berdasar alasan bahwa para pemimpin-pemimpin NU adalah mata-mata Belanda (Robert Cribb, 2008:247-250).

Menjelang tahun 1960, persaingan kedua kekuatan ini tidak hilang karena diantara golongan ini berselisih atas wacana implementasi undang-undang pertanahan (UUPA) dan gerakan anggota PKI ke dalam jabatan-jabatan resmi serta mobilisasi massa.

Persaingan juga terlihat pada pemilu tahun 1955, tetapi tidak begitu terlihat secara signifikan. Puncak ketegangan antar kekuatan di Banyuwangi meningkat pada bulan Oktober tahun 1965, bersamaan dengan isu politik Dewan Jendral atau Dewan Revolusi akibat dari peristiwa Gerakan 30 September (Surabaya Minggu, 1982: September minggu ke IV).

Sangat menarik jika menggali kembali permasalahan agraria 1965-1966 dalam sejarah Indonesia khususnya di Banyuwangi. Maka perlu dipertanyakan kembali faktor apa yang menyulut konflik di Banyuwangi, dan apakah kekerasan antar kelompok di Banyuwangi yang terjadi berkaitan dengan perselisihan agraria.

Selama ini rezim Soeharto lebih menutupi kekerasan pada masa pemerintahannya dengan jalur pengangkatan tulisan sejarah guna legitimasi kekuasaan. Pengaburan fakta masa Orde Baru merupakan sebuah keberhasilan

untuk produk generasi selanjutnya, namun pada masyarakat yang pernah mengalami ataupun hidup semasa kekerasan berlangsung masih menyimpan ingatan tersebut.

Tujuan dari tulisan ini tidak lain meninjau kembali akar permasalahan agraria yang berlangsung pada masyarakat Banyuwangi pasca Gerakan 30 September, termasuk dampak yang terjadi agar tidak menyesatkan generasi selanjutnya akibat dari bermuncunya sejarah populer peristiwa 1965-1966.

Tinjauan Literatur

Sejarah memiliki implikasi terhadap negara sebagai sebuah legitimasi kekuasaan dan identitas nasional. Negara menciptakan genealogi dengan mencatat peristiwa-peristiwa yang tepat dan menghilangkan peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan negara-bangsa.

Penciptaan genealogi ini, untuk legitimasi kekuasaan dengan menampilkan serta menggambarkan tokoh dan peristiwa secara selektif ke dalam sebuah narasi. Untuk mendapatkan legitimasi yang nyata, maka identitas-identitas lama atau konflik-konflik lama ditempatkan jauh dengan narasi kemenangan nasionalisme. Sejarah lokal yang bertentangan dengan narasi dominan tidak diberlakukan.

Pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto (1966-1998), Indonesia mengalami masa otoriter yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara cepat dan serempak dengan stabilitas politik. Pertumbuhan bangsa Indonesia awal masa Orde Baru diiringi dengan historiografi yang sentralis dan eskatologis.

Tahun 1975, setelah pelaksanaan Konferensi Sejarah Nasional diterbitkan buku sejarah nasional Indonesia. Pokok dalam sejarah nasional ini ialah penetapan periode sejarah Indonesia. Isinya mencakup: Prasejarah (sebelum tahun Masehi); Periode Kerajaan-kerajaan lama Hindu (0 – 1600 M); Kerajaan-kerajaan Islam (1600 – 1800 M); pemerintahan kolonial abad ke-19; Nasionalisme dan akhir pemerintahan kolonial (1900 – 1942); Pendudukan Jepang (1942 – 1945); Revolusi (1900 – 1942); Pendudukan Jepang (1942 – 1945), revolusi (1945 – 1950), demokrasi liberal (1950 – 1959), dan demokrasi terpimpin sampai peristiwa G30S/PKI (1965). Kemudian tahun 1984 terbit revisi sejarah nasional oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Dari hasil revisi dengan buku sejarah nasional Indonesia tidak

jauh berbeda, dan yang menjadi sorotan adalah permasalahan pasca-kolonial (Nordholt, 1988:5)

Apabila pada buku nasional Indonesia sebelum revisi, permasalahan demokrasi dipimpin sampai peristiwa G30S/PKI (1965) menekankan pada pembunuhan enam jenderal oleh partai komunis yang membawa Soeharto menjadi pahlawan dan penerbitan Supersemar sebagai teks dasar pembentukan Orde Baru yang melegitimasi kekuasaan Soeharto, serta juga pengesahan dwifungsi angkatan bersenjata. Berbeda lagi dengan edisi revisi yang mendapat sisipan penekanan peranan militer dalam keamanan nasional.

Nugroho Notosusanto dalam sejarah nasional Indonesia telah berhasil menciptakan uraian sejarah yang cukup hegemonis dengan militer sebagai pemegang peranan utama. Salah satu ciri Nugroho Notosusanto dalam penulisan sejarah nasional Indonesia ialah sejarah tanpa kekerasan yang didominasi oleh militer (Nordholt, 1988:7).

Secara tidak langsung Nugroho Notosusanto telah berhasil menghapus pembantaian 1965 – 1966 dari buku pelajaran resmi. Buku pelajaran resmi hanya menyebutkan pembunuhan enam jenderal dan empat perwira bawahannya pada malam hari tanggal 30 september-1 oktober 1965. Kemudian kisah provokatif itu berakhir, dan akibatnya ribuan orang yang dibunuh tanpa proses hukum oleh pemerintah Orde Baru secara efisien dihapus dari sejarah.

Historiografi nasional selalu dilihat oleh pemerintah sebagai kunci penting untuk membangun kesadaran sejarah, akan tetapi terdapat persoalan mengenai sejauh mana kesadaran ini sepenuhnya terpatri dalam pikiran masyarakat Indonesia. Meskipun pemerintah membangun sejarah yang lebih besar tetapi tidak berarti pandangan sejarah dapat membentuk ingatan secara seragam. Penghapusan sejarah baru tidak seharusnya dilakukan, guna menghindari penjelasan sejarah populer yang menyesatkan seputar Gerakan 30 September.

Menurut Tri Chandra (2016:236) tahun 1959 hingga 1967 merupakan periode sangat penting dalam sejarah. Masyarakat terpecah-pecah atas kekuatan politik dan terlibat dalam perebutan klaim kebenaran atas dasar ideologinya, Termasuk gagasan pelaksanaan landreform yang merujuk pada UUPA 1960 menjadi ruang yang diperebutkan secara politis.

Lebih jauh lagi, Tri Chandra menjelaskan saat itu terjadi pergeseran makna penataan ulang sumber-sumber agraria, sehingga masyarakat

terpolarisasi dengan mudah antara kekuatan muslim dengan komunis. Upaya penataan sumber-sumber agraria mengalami pergeseran yang dalam praktek politiknya berlangsung dalam bentuk aksi sepihak. Akibatnya mengacaukan struktur dan sistem kehidupan pedesaan, maka terjadilah arus balik atas tindakan aksi sepihak tersebut.

Arus balik inilah yang menyebabkan adanya gesekan antar dua kubu, komunis dan muslim. Menurut Marx (Novri Susan, 2010: 39), konflik dalam sejarah dan masyarakat kontemporer adalah akibat dari benturan kepentingan kelompok-kelompok sosial. Untuk mencapai kepentingan ini, tidak sedikit kelompok sosial menggunakan kekerasan. Hal ini serupa dengan pendapat Hobbes, bahwa kelompok sosial ataupun organisasi sosial mengarahkan dan menentukan tindakan apa saja yang paling tepat untuk mereka, termasuk kapan kekerasan dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan (Novri Susan, 2010: 116).

Metode

Tulisan ini menggunakan metode sejarah namun mengingat penelitian ini bersifat kontemporer, maka sumber yang digunakan sumber tertulis serta tinjauan dari kajian yang sudah ada sebelumnya berupa literatur dan kajian akademis.

Menurut Heather Sutherland (Nordholt, 1998:34) sejarah merupakan catatan terus menerus secara sistematis tentang kejadian-kejadian dalam masyarakat, kajian perkembangan negara, rangkaian kejadian yang berkaitan dengan negara orang, benda, dan sebagainya. Definisi tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam *Conside Oxford Dictionary* edisi 1964, membuat para sejarawan banyak menghadapi pilihan penulisan sejarah. Guna menghadapi pilihan-pilihan tersebut diperlukan '*historicise history*' atau menguji sejarah penulisan sejarah agar mendapati pemahaman apa yang mempengaruhi penulisan sejarah.

Menurut Burke (Nordholt, 1998:28) tantangan bagi sejarawan sosial adalah bagaimana mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan kejadian yang lebih besar. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dapat terdiri serangkaian kejadian yang mungkin tidak terpisahkan dari kegiatan rutin sehari-hari, meski kejadian itu mungkin bermakna dalam kehidupan individu.

Hasil dan Diskusi

Permasalahan agraria yang tak kunjung usai akan memunculkan banyak permasalahan yang multidimensional. Banyak sejarah sosial yang dapat dikaji dalam hal ini. Jika kembali masa lampau persoalan agraria Indonesia diawali dengan upaya pemberlakuan landreform.

Landreform sebagai usaha untuk menata kembali kepemilikan tanah dan usaha pendistribusian tanah kepada para petani yang tidak memiliki tanah. Wacana landreform setidaknya dilaksanakan di Jawa karena penduduknya yang mulai padat.

Tjondronegoro dalam buku *Dua Abad Penguasaan Tanah (2008)* di Jawa terdapat ribuan hektar tanah milik perkebunan. Prespektif masyarakat Indonesia, tanah-tanah tersebut merupakan milik rakyat Indonesia. Namun, karena praktek tanam paksa dimasa Gubernur Jendral van den Bosch dan diterapkannya *Agrarische Wet 1875*, maka secara hukum tanah-tanah tersebut dijadikan tanah perkebunan para pemilik modal Eropa yang diundang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Masyarakat Indonesia menganggap perkebunan-perkebunan tersebut sebagai sumber penghisapan dan penindasan. Oleh sebab itu setelah proklamasi wacana landreform segera dilaksanakan guna mengembalikan tanah-tanah perkebunan kepada pemilik aslinya, khususnya kepada petani.

Namun tanah-tanah perkebunan yang awalnya diperkirakan menjadi obyek landreform ternyata tidak dapat diganggu-gugat. Perjanjian KMB tahun 1948 mengharuskan semua perkebunan milik kaum modal Eropa yang dikuasai Indonesia, harus dikembalikan kepada pemilik modal, sebagai imbalan bagi pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia.

Pada tahun 1957-1958, setelah pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia, dilakukan nasionalisasi perkebunan asing. Nasionalisasi tersebut dilakukan guna pelaksanaan landreform, tetapi tanah perkebunan tersebut tidak terlaksana kembali menjadi obyek landreform. Tanah-tanah tersebut diserahkan kepada militer, yang kemudian dijadikan perusahaan milik negara dan sebagian lagi dijual kepada orang pribumi pemilik modal.

Pada tahun 1960 dikeluarkannya UUPA (Undang Undang Pokok Agraria). UUPA merupakan perombakan total dari sistem agraria warisan pemerintah kolonial. Wacana landreform di Jawa menjadikan tanah-tanah perkebunan sebagai obyek pendistribusian kepada pemilik asli (orang pribumi) tidak dimungkinkan

lagi, karena luas tanah di Jawa sudah tidak memadai untuk obyek landreform. Tanah perkebunan sudah menjadi tanah milik perkebunan negara dan perkebunan swasta, kemudian obyek landreform dialihkan ke tanah-tanah pertanian.

Pengalihan obyek landreform ke tanah-tanah pertanian didasarkan atas asumsi ketidakadilan pada kepemilikan tanah-tanah pertanian. Pengalihan ini diterapkan kepada tanah-tanah pertanian milik perorangan yang luasnya melebihi dari luas tanah yang diizinkan oleh UUPA. Dimisalkan, seorang petani mempunyai tanah 3,5 hektar, maka tanah yang menjadi obyek landreform hanyalah 1,5 hektar saja. Karena berdasarkan UUPA, tanah maksimal yang dimiliki oleh petani hanya 2 hektar.

Adanya UUPA, para pemilik tanah pertanian yang luasnya melebihi luas ketentuan UUPA berusaha untuk menghindari kebijakan tersebut. Para pemilik tanah pertanian memanfaatkan celah hukum yang ada, dengan jalan mengalihkan hak kepemilikan tanahnya kepada anggota keluarga. Pada akhirnya tidak terdapat lagi tanah pertanian di Jawa untuk dijadikan obyek landreform, sehingga pelaksanaan landreform tidak terwujud.

Menyebut-nyebut permasalahan agraria pasti yang terlintas hanyalah masalah tanah belaka dan tidak ada imbas atau *effect* besar pada masyarakat sosial Indonesia. Jika ditelisik mendalam permasalahan agraria merupakan hal kompleks. Seperti yang dinyatakan oleh Mochammad Tauchid (2007) bahwa Siapa Menguasai Tanah, Ia Menguasai Makanan.

Para pemilik tanah pertanian dalam menyiasati UUPA membagikan tanahnya kepada anggota keluarga, selanjutnya tidak terdapat lagi tanah yang tersisa untuk petani yang tidak memiliki tanah. Hal ini menjadi sebuah konflik horizontal yang sifatnya sangat politis.

Menurut Aminudin (2009), konflik horizontal ini berupa aksi sepihak yang terjadi antara para pemilik tanah –kebanyakan ialah anggota PNI (Partai Nasional Indonesia) dan pemimpin kelompok agama yang berafiliasi dengan NU (Nahdlatul Ulama)– melawan petani yang tidak bertanah –yang didukung oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), dengan berafiliasi BTI (Barisan Tani Indonesia).

Konflik ini meluas di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah antara PNI melawan PKI, di Bali antara PNI melawan PKI, dan Jawa Timur antara NU melawan PKI. Konflik atas tanah berhenti setelah PKI dibubarkan serta di anggap sebagai partai terlarang di Indonesia. Berhentinya konflik atas tanah juga

menandai dihentikannya pelaksanaan UUPA, sehingga praktek landreform atas tanah pertanian tidak jadi dilaksanakan.

Konflik sosial masyarakat ini dapat dikatakan sebagai dasar dari konflik politik selanjutnya, yang mengakibatkan pembantaian massal terhadap anggota PKI dan juga simpatisan PKI – Lekra, BTI, Gerwani, PGRI non vaksentral.

Di Banyuwangi, PKI dengan kekuatan gabungan BTI (Barisan tani Indonesia) dan Pemuda Rakyat melakukan pula aksi sepihak (Yayasan Pancasila Sakti: 1982) Aksi yang terjadi ini merupakan bentuk perjuangan hak masyarakat kecil tidak bertanah kepada kelompok si-pemilik tanah.

Terjadinya aksi sepihak ini menimbulkan kecemasan dari pihak-pihak yang dirugikan karena tanahnya yang diambil (Ulf, 1986: 323). Pengaruh PKI terhadap para petani yang begitu kuat, menyebabkan aksi sepihak terjadi berurutan dari satu daerah ke daerah lain hampir tiap bulan. Diawali pada bulan Juli 1961, setelah gabungan 22 organisasi massa onderbouw PKI Banyuwangi meminta pertanggungjawaban atas kemacetan program UUPHB dan UUPA (Aminudin, 2009: 101).

Pada laporan surat kabar Harian Suara Indonesia tanggal 5 Januari 1965, di Kecamatan Genteng terjadi aksi sepihak 9 buah desa yang diikuti sekurangnya 6.720 orang. Di Glenmore 70 petani melakukan aksi sepihak pada 9 hektar tanah abstain. Selain Genteng dan Glenmore terjadi aksi sepihak di Srono, Cluring, Kabar, Gambiran dan Glagah. Semula aksi sepihak yang terjadi adalah pemboikotan tanah, namun aksi berkembang menjadi aksi pengerusakan atau pembakaran rumah, perampasan hasil tanaman, serta aksi yang menimbulkan kekacauan (Iwan, 1992:244).

Seperti yang telah disebutkan Tri Chandra (2016:236) masyarakat terpecah-pecah atas kekuatan politik dan gagasan pelaksanaan landreform menjadi ruang yang diperebutkan secara politis. Akibat adanya aksi sepihak tersebut maka terjadilah arus balik atas tindakan tersebut.

Di Banyuwangi, arus balik ini ditunjukkan dengan upaya massa Marhaenis dan NU membatalkan pelantikan Bupati Banyuwangi Soewarso Kanapi. Alasan dua kekuatan ini menggagalkan pelantikan bupati dengan memblokade pendopo Kabupaten Banyuwangi lantaran Soewarso dianggap berpihak pada aksi sepihak, dan Soewarso pernah melindungi aksi sepihak dari salah satu golongan yang menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak (Duta Masyarakat, 1965)

Arus balik balik berupa gesekan kekuatan tanpa adanya aksi kekerasan. Selanjutnya peristiwa malam 30 September 1965 atau yang dikenal G30S/PKI

menjadi momentum awal benturan kepentingan antar kelompok. Sebagaimana pendapat Hobbes, kelompok sosial ataupun organisasi sosial mengarahkan dan menentukan tindakan apa saja yang paling tepat untuk mereka (Novri Susan, 2010: 116).

Kelompok non Komunis di Banyuwangi memilih memanfaatkan kekerasan dengan membentuk kelompok Front Bersatu. Kelompok ini selanjutnya melakukan pengerusakan beberapa fasilitas yang ada di Srono, dan massa membakar rumah yang bertuliskan BTI. Front Bersatu juga melakukan pengerusakan di sekitar alun-alun kota yang di duga sebagai simpatisan PKI (Priya Purnama, 2012: 69).

Puncak ketegangan ditandai dengan insiden Cemetuk dan Karangasem. Tindakan kekerasan ini dipicu antara pemuda Ansor dan pemuda Marhanisme melawan simpatisan PKI (Abdul, 2014:18). Tahun 1966, pembantaian mulai mereda, namun banyak tekanan dari berbagai pihak terhadap simpatisan PKI termasuk sanksi moral.

Kesimpulan

Pada rentetan peristiwa di Banyuwangi dapat dilihat aksi sepihak muncul dikarenakan kelompok yang tidak bertanah resah belum segera mendapatkan tanah yang dijanjikan dari program UUPA, sementara para pemilik tanah juga enggan membagi tanahnya melalui UUPA melakukan perlawanan. Maka terjadilah arus balik dimana aksi balasan ini sebagai bentuk perlawanan. Peristiwa ini pun tidak terlepas dengan adanya benturan kepentingan masyarakat yang berafiliasi pada golongan dapat memicu konflik, seperti juga yang terjadi di Banyuwangi. Menjadi menarik masyarakat yang terpolarisasi atas golongan dibenturkan dengan permasalahan konflik agraria. Masyarakat yang bingung ditunggangi kepentingan, salah satunya isu politik untuk mengulingkan calon Bupati Suwarso Kanapi. Pengaruh akan kepentingan tidak berakhir hanya pada panggung politik, untuk memantapkan dan menjawab ketegangan antar pengaruh atas golongan PKI -NU, dimanfaatkanlah kekerasan untuk menekan kelompok yang selama ini telah berselisih untuk dikalahkan. Masih banyak peristiwa yang terekam pada masa 1965-1966, rentetan konflik agraria banyak menceritakan kisah yang jarang untuk dilihat kembali dan ditulis kembali. Pemikiran kembali permasalahan agraria perlu dipertimbangkan, meski konsekuensinya akan menjadi sebuah kontradiksi terhadap kelompok tertentu lantaran permasalahan ini diperkirakan masih

berusia muda, namun dalam tulisan ini menyisakan pertanyaan yang perlu dikaji kembali bagaimana pelebagaan kekerasan agar menekan kelompok tertentu.

Referensi

- Aprianto, Tri Chandra, (2016). Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan Partispasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria di Jember. Yogyakarta: STPN Press.
- Budiawan, (2004). Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto, Jakarta: ELSAM
- Colombijn, Freek dan J. Thomas Lindblad (Ed), (2002). *Roots of Violence in Indonesia*. Leiden: KITLV.
- Cribb, Robert. (2004). The Indonesia Killings: Pembantaian di Jawa dan Bali 1965-1966. Jakarta: Mata Bangsa.
- Kasdi, Aminuddin. (2009) . Kaum merah menjarah. Surabaya: YKCB dan Centre Indonesian Communities Studies.
- Koentowijoyo, (2008). *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Koentowidjoyo, (1995). Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Luthfi, Ahmad Nashi. (2018) kekerasan kemanusiaan dan perampasan tanah pasca 1965 di Banyuwangi. Archipel. Retrieved from <https://journal.openedition.org/archipel/624>
- Luthfi, Ahmad Nashi. (2017) Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan PERTANU. Jurnal Bhumi Vol, 3. 145-160.
- Monslow, Alun.(2003). *The New Histotry*. Pearson Longman.
- Mudzakkir, A(2016, 3 Mei), NU, PKI, dan Kemungkinan Rekonsiliasi, Retrieved from <https://www.nu.or.id/post/read/67838/nu-pki-dan-kemungkinan-rekonsiliasi>.
- Mun'im DZ, H. Abdul (2014). Benturan NU-PKI 1948-1965. Depok: Langgar Swadaya Nusantara.
- Nordholt, H.S., Bambang P. dan Ratna S. (Ed). (1998). Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: yayasan Obor Indonesia ; KITLV- Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan.
- Paige, Jeffery M, (2011). Revolusi Agraria. Imperium.
- Purwanto, Bambang (2001). Historisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis Terhadap Historigrafi Indonesiasentris. Jurnal Humaniora, Vol XIII. 29-44.
- Priya purnama. (2012). Konflik Berdarah di Desa Karangasem Kecamatan Banyuwangi 18 oktober 1965. Universitas Jember: Skripsi.

- Roosa, John. (2008). *Dahlil pembunuhan Massal*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
- Sanit, Arbit. (2000). *Badai revolusi: sketsa kekuatan politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Sudjatmiko, Iwan Gardono. (1992). *The destruction of the Indonesian Communist Party (PKI) (a comparative analysis of East Java and Bali)*. Massachusetts: Harvard University.
- Surat Kabar Duta Masyarakat. (8 Januari 1965), *Puluhan Ribu Massa Membatalkan Pelantikan Bupati/KDH Banjuwangi*.
- Surat Surabaya Minggu, (September 1982), *Dewan Djendral, minggu ke IV*.
- Suwondo, Kutut. (2003) *Civil Society: Di Atas Lokal, Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa*. Salatiga: Pustaka Pelajar dan Pustaka Percik.
- Sundhaussen, Ulf. (1986). *Politik militer indonesia 1945-1967 menuju dwi fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.
- Tauchid, Mochammad, (2007). *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Pewarta
- Tjondronegoro, S.M.P. dan Gunawan Wiradi (Ed), (2008). *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: Obor.
- Zakie, Mukmin (2016) *Konflik Agraria yang tak pernah reda*. *Jurnal Legality*. Vol, 24. 40-55